

PROPOSAL PENELITIAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR KETERTINGGALAN WILAYAH DI
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Diajukan untuk memenuhi
Syarat memperoleh gelar kesarjanaan S1
Pada Fakultas Geografi UGM



Oleh :

Martina Ayu Sejati

15/382407/GE/08177

Dosen Pembimbing :

Dr. Lutfi Muta`ali, S.Si., MT.

DEPARTEMEN GEOGRAFI PEMBANGUNAN
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA

2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Tinjauan Pustaka.....	3
1.5.1. Konsep Wilayah	3
1.5.2. Pengertian Desa.....	5
1.5.3. Konsep Pembangunan.....	8
1.5.4. Kemiskinan Wilayah.....	9
1.5.5. Kesenjangan dan Ketertinggalan Wilayah	11
1.5.6. Tipologi Wilayah Tertinggal.....	14
1.5.7. Karakteristik dan Permasalahan Wilayah Tertinggal.....	17
1.5.8. Strategi dan Kebijakan	22
1.6. Keaslian Penelitian	26
1.7. Kerangka Pemikiran	31
BAB 2 METODE DAN TEKNIK ANALISIS.....	33
2.1. Pemilihan Lokasi Penelitian	33
2.2. Data dan Variabel Penelitian	40
2.3. Keterkaitan Data dengan Populasi	42
2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	43
2.4.1. Penelitian Kepustakaan	43
2.4.2. <i>Indepth Interview</i>	44
2.5. Teknik Pengolahan Data.....	45
2.5.1. Skoring	Error! Bookmark not defined.
2.5.2. Tipologi Wilayah Tertinggal.....	46
2.5.3. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif.....	47

2.5.4. Analisis SWOT	47
2.6. Batasan Operasional	51
2.7. Jadwal Penelitian	53
Daftar Pustaka.....	54

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Supriadi (2013) dalam acara *Focus Group Discussion* Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) menyatakan bahwa kesenjangan antar daerah merupakan salah satu isu kebijakan yang sejak lama menjadi perhatian pemerintah, meskipun tingkat kesenjangan antar wilayah semakin membaik, pemerintah masih perlu meningkatkan intervensi kebijakan untuk terus mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurut Trinanda (2013) Pembangunan bagi suatu daerah merupakan hal yang penting sebab berkaitan dengan kondisi dari perkembangan daerah tersebut. Pembangunan berkaitan dengan pengembangan, pengembangan wilayah merupakan serangkaian usaha dalam membentuk keterpaduan dalam menggunakan berbagai sumberdaya. Pengembangan wilayah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak negatif dari proses pembangunan dan perkembangan wilayah yang paling terasa yaitu kesenjangan, kesenjangan wilayah membagi dua tipe wilayah menjadi wilayah maju dan tertinggal, namun masih diperlukan perhatian khusus bagi daerah dengan pertumbuhan yang rendah (daerah tertinggal). Pembangunan ditingkat daerah diupayakan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan manusianya secara optimal dengan

memperhatikan asas-asas pembangunan seperti pemerataan, keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan.

Menurut Firdaus (2013) Masalah mengenai kesenjangan pembangunan wilayah merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap negara, begitu pula yang terjadi di Indonesia baik itu meliputi cakupan wilayah desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Fenomena tersebut terjadi akibat dari beberapa faktor seperti tertutupnya akses terhadap dunia luar, tertutupnya akses ini dapat disebabkan oleh kondisi dan keterbatasan dari fasilitas pendukung sehingga informasi tidak dapat sampai dan tersebar, informasi tersebut diibaratkan seperti pendidikan, dan ilmu pengetahuan.

Isu pembangunan daerah tertinggal menurut Kementerian Desa (2015) diantaranya adalah rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya persentase penduduk miskin, rendahnya ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas serta banyaknya desa yang masuk ke dalam kategori desa tertinggal sehingga diperlukan kajian dan pembahasan mengenai penyebab dan faktor - faktor ketertinggalan wilayah yang ada. Penyelesaian permasalahan mengenai ketertinggalan ini perlu dibahas dan dikaji lebih lanjut sebab berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan ketimpangan pembangunan. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan setiap wilayah berbeda-beda, untuk mampu menyeimbangkan hal tersebut diperlukan pemahaman mengenai potensi dan permasalahan guna menyusun strategi pembangunan wilayah sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pemerataan dalam hal ini diperlukan konsentrasi khusus dalam memahami kondisi suatu wilayah dengan menentukan tingkat ketertinggalan desa di daerah tertinggal.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk kedalam kategori Daerah Tertinggal menurut Perpres No. 131 Tahun 2015. Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki karakteristik dan kekayaan alam serta manusia yang cukup memadai namun masih masuk ke dalam kategori daerah tertinggal, selain itu Kabupaten Sumbawa Barat yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa Besar pada tahun 2000 sehingga masih perlu untuk diperhatikan baik dari segi perkembangan wilayahnya dan diperlukan suatu kajian khusus mengenai faktor penyebab ketertinggalan wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat

1.2. Rumusan Masalah

Tujuan dari pembangunan nasional salah satunya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keseimbangan dan pemerataan pembangunan, begitu pula yang tertuang dalam nawacita Jokowi-JK yang ketiga. Komitmen tersebut sekaligus mencerminkan perhatian pemerintahan saat ini yang memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga.

Analisis mengenai faktor yang mempengaruhi dan mengakibatkan ketertinggalan di suatu wilayah akan membantu dalam mengetahui apa saja yang mendasari dan menyebabkan ketertinggalan wilayah sehingga dapat diketahui penyebab yang paling dominan serta dapat diupayakan suatu solusi baik dalam

bentuk strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah. Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang masuk ke dalam kategori wilayah tertinggal menurut Perpres No.131 Tahun 2015

Tabel 1.1 Daftar Daerah Tertinggal (Provinsi Nusa Tenggara Barat) menurut Perpres No. 131 Tahun 2015

NO	Kode Kabupaten	Provinsi	Kabupaten
1	5201	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat
2	5202	Nusa Tenggara Barat	Lombok Tengah
3	5203	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur
4	5204	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa
5	5205	Nusa Tenggara Barat	Dompu
6	5206	Nusa Tenggara Barat	Bima
7	5207	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat
8	5208	Nusa Tenggara Barat	Lombok Utara

Kajian mengenai ketertinggalan wilayah di Kabuapten Sumbawa barat belum sampai pada tahapan analisis faktor yang mengakibatkan mengapa desa yang ada masuk ke dalam kategori desa tertinggal, selain itu bagaimana tingkat ketertinggalan desa juga belum dapat diketahui sebarannya hingga unit terkecil yaitu desa. Kondisi topografi wilayah yang didominasi oleh tingkat kemiringan lereng yang curam menjadikan keunikan tersendiri tentang bagaimana kondisi ketertinggalan wilayahnya. Penyusunan strategi guna mengatasi ketertinggalan wilayah sangat diperlukan guna menyelesaikan permasalahan ketertinggalan wilayah akibat dari ketimpangan pembangunan.

1. Bagaimana tingkat ketertinggalan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Faktor apa saja yang mengakibatkan ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat?
3. Strategi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menentukan tingkat ketertinggalan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat
2. Menganalisis faktor yang mengakibatkan ketertinggalan desa di Kabupaten Sumbawa Barat
3. Menentukan strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang akan dicapai dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai bahan dan masukan bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Penelitian dapat memberikan informasi yang cukup dan melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada ilmu pembangunan wilayah dan geografi.
2. Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam menyusun regulasi ataupun kebijakan dalam mengatasi Ketertinggalan wilayah.

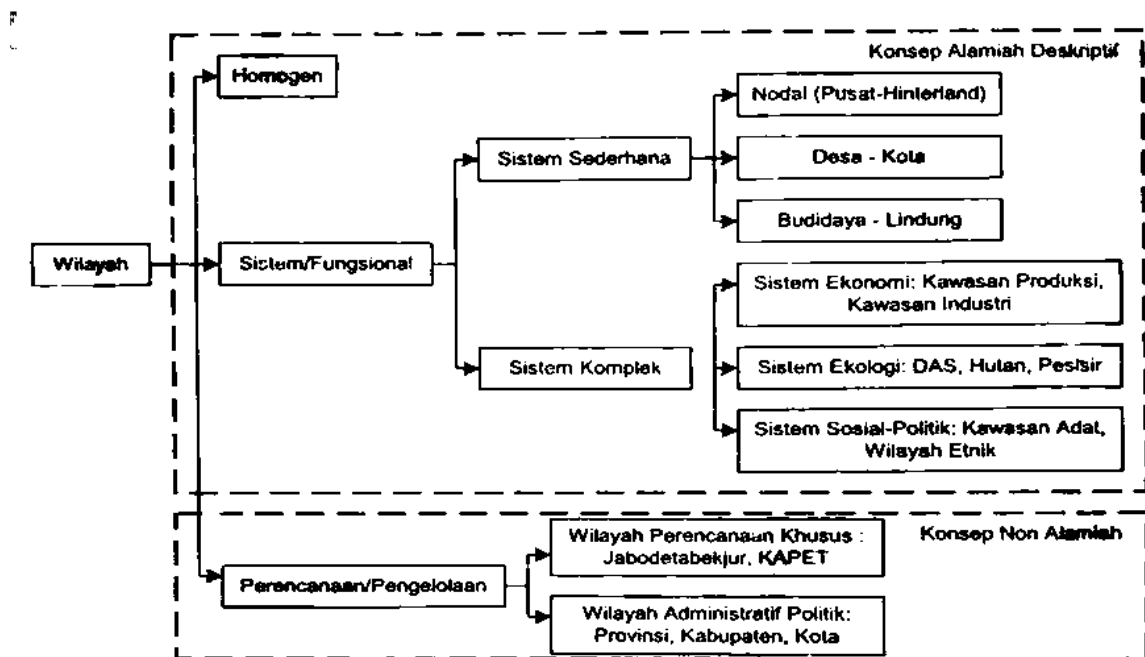
1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Wilayah

Pengertian Kawasan menurut Israd (1975) dalam Rustiadi, Ernani dkk (2009) kawasan merupakan istilah yang sering digunakan untuk menekankan aspek fungsional sehingga kawasan merupakan suatu hubungan dari beberapa komponen fungsional yang ada pada suatu wilayah. Batasan dan sistemnya dipengaruhi oleh

aspek fungsional, sedangkan pengertian wilayah merupakan suatu ruang yang ditekankan pada kondisi fisik seperti wilayah pegunungan ataupun wilayah perairan. Pengertian daerah merupakan suatu ruang yang ada di permukaan bumi yang batas-batasnya ditekankan pada aspek administrasi yang telah diatur dalam suatu peraturan daerah ataupun undang-undang tertentu.

Pengertian wilayah menurut sistem/fungsionalnya dibedakan menjadi sistem sederhana dan sistem kompleks, dalam penelitian ini digunakan konsep wilayah dengan sistem sederhana yaitu berupa Desa-Kota, berupa unit kabupaten yang dikaji per kecamatan dan dirinci per-desa. Wilayah kabupaten merupakan suatu kawasan dengan fungsi sebagai pusat administrasi dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dipimpin oleh seorang bupati dan untuk kota disebut dengan walikota. Wilayah yang termasuk ke dalam lingkup kabupaten yaitu kecamatan. Kecamatan merupakan sub-unit dari kabupaten yang memiliki sistem administrasi dan batas-batas wilayah yang diatur dalam peraturan yang ada. Pembagian wilayah berdasarkan sistem atau fungsionalnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1.1 Sistematika Konsep-konsep Wilayah (2009)

1.5.2. Pengertian Desa

Desa merupakan permukiman manusia yang lokasinya berada di luar wilayah kota serta masyarakatnya memiliki jiwa agraris. Secara administratif desa disebut dengan kelurahan yang dikepalai oleh lurah atau kepala desa. Menurut Israd (1975) dalam Rustiadi, Ernani dkk (2009) faktor-faktor geografis sangat berpengaruh dalam menentukan definisi desa, unsur-unsur geografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural merupakan faktor yang menjadikan hubungan dan pengaruh antar desa, sedangkan secara administratif desa dikatakan sebagai suatu ruang yang dimana mampu mengadakan pemerintahannya sendiri. Terdapat tiga unsur penting desa diantaranya adalah wilayah, satu keturunan (penduduk) dan ajaran/adat (tata kehidupan). Persebaran desa merupakan distribusi atau pengelompokan mengelompokkan antara satu desa dengan desa yang lain.

Penyebab dari persebaran desa salah satunya adalah faktor geografis, hal yang mendasar dalam proses persebaran desa yaitu :

- Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan alam
- Penduduk desa mayoritas memanfaatkan alam (agraris)
- Penduduk masyarakat memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat.

Bentuk dan pola desa menurut Daldjoeni (2014) sebagai berikut :

a. Bentuk desa menyusuri sepanjang pantai

merupakan desa yang terletak di daerah pantai yang landai biasanya masyarakat memiliki tempat tinggal yang mengikuti garis pantai dan kegiatan masyarakat terkonsentrasi pada perikanan dan pertanian.

b. Bentuk desa yang terpusat/pegunungan

merupakan desa yang terpusat dan berada di tengah, dipengaruhi oleh kondisi geografis berupa pegunungan, masyarakatnya biasanya berasal dari satu atau beberapa keturunan yang sama secara dinamis mengalami perkembangan dan perluasan.

c. Bentuk desa linier di dataran rendah

pola permukiman biasanya memanjang dan sejajar dengan rentangan jalan raya yang melewati desa. Secara dinamis mengalami perkembangan mengikuti jaringan jalan namun, terdapat pula pemekaran kearah pedalaman.

d. Bentuk desa mengelilingi fasilitas

merupakan bentuk atau pola permukiman yang berada di dataran rendah serta perkembangannya mengikuti keberadaan fasilitas, fasilitas sebagai magnet

sebab memberikan kebutuhan bagi masyarakat sehingga permukiman berusaha untuk memiliki akses yang paling baik agar dapat menjangkau keberadaan fasilitas yang ada.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 dalam Muta'ali (2013) tentang pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan bahwa profil desa dan kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kelembagaan, sarana dan prasarana serta permasalahan yang ada di desa. Indikator potensi desa diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.2. Indikator Potensi Desa

No	Potensi Desa	Indikator
1	Sumberdaya Alam	1. Potensi umum yang meliputi batas dan luas wilayah, iklim, jenis dan kesuburan tanah, orbitrasi, bentang wilayah, dan letak
		2. Pertanian
		3. Perkebunan
		4. Kehutanan
		5. Peternakan
		6. Perikanan
		7. Bahan galian
		8. Sumberdaya air
		9. Kualitas lingkungan
		10. Ruang publik/taman
		11. Wisata
2	Sumberdaya Manusia	1. Jumlah penduduk
		2. Usia
		3. Pendidikan
		4. Mata pencaharian
		5. Agama dan aliran kepercayaan
		6. Kewarganegaraan

No	Potensi Desa	Indikator
3	Sumberdaya Kelembagaan	7. Etnis/suku bangsa
		8. Cacat fisik dan mental
		9. Lembaga keamanan dan ketertiban
		1. Lembaga pemerintah desa dan kelurahan
		2. Lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan
		3. Lembaga social kemasyarakatan
		4. Organisasi profesi
		5. Lembaga adat
		6. Lembaga keamanan dan ketertiban
4	Sarana dan prasarana	7. Lembaga prekonomian
		8. Lembaga pendidikan
		9. Partai politik
		1. Transporasi
		2. Informasi dan komunikasi
		3. Rasarana air bersih dan sanitasi
		4. Prasarana dan kondisi irigasi
		5. Prasarana dan sarana pemerintah
		6. Prasarana dan saran lembaga kemasyarakatan
		7. Prasarana peribadatan
		8. Prasarana olahraga
		9. Prasarana dan sarana kesehatan
		10. Prasarana dan sarana pendidikan
		11. Prasarana dan sarana energi penerangan
		12. Prasarana dan sarana hiburan/wisata
		13. Prasarana dan sarana kebersihan

1.5.3. Konsep Pembangunan

Menurut Suryono (2010) Pembangunan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan berbagai aspek yang ada dimasyarakat atau sering diartikan sebagai suatu proses yang menyeluruh. Hakekat dari pembangunan merupakan suatu proses yang terus berlanjut/berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaan biasanya tidak

terbatas, selain itu pembangunan juga dapat diartikan sebagai usaha/upaya yang dilakukan secara sadar, kontinu dan dilandasi oleh suatu perencanaan yang melibatkan berbagai multi dimensional.

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang dinamis dan multi dimensi sebab, melibatkan berbagai aspek dan mengintegrasikannya dalam suatu wujud baik itu tindakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan dan perubahan suatu wilayah kearah yang lebih baik. Dampak dari pembangunan dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Demi terwujudnya pembangunan yang positif maka diperlukan partisipasi dari berbagai stakeholder (Nugroho. 2004).

Pembangunan perdesaan Daldjoeni (2014) merupakan suatu upaya dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk dapat mencapai pertumbuhan desa secara merata, adil, mandiri dan berkelanjutan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan perdesaan diantaranya :

1. Pertumbuhan (growth)
2. Pemerataan (equity)
3. Kesejahteraan (welfare)
4. Kemandirian
5. Keberlanjutan (sustainability)

1.5.4. Kemiskinan Wilayah

Kemiskinan dalam aspek wilayah menurut Sumodiningrat (2004) memberikan kerangka yang komprehensif bagi upaya menghapus kemiskinan. Kemiskinan di dalam pembangunan wilayah tidak hanya dapat ditinjau sebagai

sasaran atau keluaran yang harus dihapuskan keberadaannya, tetapi juga dapat menjadi bagian proses analisis pembangunan mencapai dalam mencapai tujuan.

Kemiskinan wilayah merupakan dampak dari ketidak merataan pembangunan, namun kemiskinan wilayah juga dapat disebabkan oleh kondisi fisik, sosial dan budaya yang ada pada wilayah tersebut. Kondisi geografis juga dapat menjadi pemicu dari kemiskinan wilayah. Wilayah miskin terdefinisi menjadi dua jenis yaitu miskin secara fisik baik itu miskin secara sumberdaya alam dan miskin secara sosial budaya yaitu rendahnya kualitas sumberdaya alam yang dimiliki.

Menurut Sajogyo (1975) dalam Nugroho (2004) rendahnya potensi sumberdaya alam wilayah berdampak pada rendahnya nilai jual baik dari segi wilayah maupun sumberdaya yang ada. Sedangkan kemiskinan dari segi sosial budaya merupakan rendahnya kualitas dari sumberdaya manusia yang tercermin dari rendahnya tingkat pengetahuan. Rendahnya tingkat pengetahuan berdampak pada rendahnya inovasi dan rasa ingin maju dan bangkit sehingga dalam menangani kemiskinan wilayah harus ditinjau dari berbagai sisi. Pada umumnya kemiskinan menggunakan kriteria berupa ukuran-ukuran ekonomi seperti pendapatan, tingkat konsumsi, atau kebutuhan dasar lainnya.

Menurut World Bank (1993, 1995) dalam Nugroho (2004) mengidentifikasi lebih dari dua belas perubah yang terangkum dalam prioritas dan indikator kemiskinan yang diharapkan menjadi panduan bagi upaya pemberantasan kemiskinan di negara berkembang, yang populer adalah digambarkan dalam permata pembangunan (*development diamond*) yang terdiri atas empat sudut yaitu :

- Produk nasional kotor perkapita

- Akses terhadap air bersih
- Angka harapan hidup
- Pendidikan dasar/angka melek huruf.

1.5.5. Kesenjangan dan Keteringgalan Wilayah

Menurut Muta'ali (2014) ketimpangan adalah suatu kondisi ketidakseimbangan. Ketimpangan wilayah dapat digambarkan sebagai suatu kondisi ketidaksesuaian antara tingkat perkembangan dan pembangunan wilayah antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Terdapat tiga faktor yang mendasari kesenjangan wilayah tersebut yaitu faktor alam, sosial dan kebijakan. Faktor alam mencakup kondisi sumberdaya alam, letak geografis kondisi topografi, kondisi wilayah dan jarak terhadap pusat aktivitas ekonomi, sedangkan yang termasuk ke dalam faktor sosial yaitu termasuk didalamnya yaitu mobilitas ekonomi, sosial, inovasi, dan wiraswasta, sedangkan yang termasuk ke dalam faktor kebijakan dapat diartikan sebagai pengaruh kebijakan yang dilaksanakan selama proses pembangunan yang secara langsung mendukung terjadinya proses ketimpangan/kesenjangan. Indikator penentu daerah tertinggal menurut KNPDT dalam Muta'ali (2014) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Indikator Penentu Daerah Tertinggal menurut KNPDT

NO	INDIKATOR	KRITERIA
1.	Perekonomian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penduduk Miskin - Indeks kedalaman Kemiskinan
2.	Sumberdaya Manusia	

NO	INDIKATOR	KRITERIA
	a. Tenaga Kerja	- Persentase jumlah penduduk yang menganggur di suatu daerah
	b. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase desa dengan kasus balita kurang gizi - Persentase desa dengan kasus non balita kurang gizi - Angka kematian bayi - Angka harapan hidup - Jumlah prasarana kesehatan - Rata-rata jarak pelayanan prasarana kesehatan
	c. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Angka melek huruf - Tingkat pendidikan penduduk dengan usia 15 tahun ke atas - Jumlah murid SD, SMP dan SMA - Jarak terhadap prasarana pendidikan seperti sekolah
3.	Prasaranan atau Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Transportasi : berdasarkan jenis keadaan jalan (aspal, beton, diperkeras, tanah dll) - Persentase rumah tangga pengguna listrik - Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon - Jumlah Bank Umum - Jumlah Pasar - Jumlah BPR (Bank Perkreditan Rakyat)
4.	Kelembagaan atau Keuangan Lokal	Selisih nilai antara penerimaan keuangan daerah dengan belanja pegawai

NO	INDIKATOR	KRITERIA
5.	Aksesibilitas	Jarak dengan pusat kota (antara kantor desa/kantor kecamatan dengan pusat kabupaten)
6.	Karakteristik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kerawanan bencana gempa - Tingkat kerawanan bencana banjir - Tingkat kerawanan longsor - Keberadaan pada kawasan lindung - Tingkat persentase lahan kritis - Tingkat kerawanan konflik

Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (PerPres No. 131 Tahun 2015) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah, indikator tersebut berupa :

- Perekonomian masyarakat
- Sumberdaya manusia
- Sarana dan Prasarana
- Kemampuan keuangan daerah
- Aksesibilitas
- Karakteristik daerah

Pengertian desa tertinggal menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 yaitu desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi

belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Sedangkan desa berkembang, atau bisa disebut sebagai desa madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Sedangkan desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

1.5.6. Tipologi Wilayah Tertinggal

Tipologi wilayah merupakan pembagaian wilayah berdasarkan tipe-tipe dengan penciri yang sama namun ditekankan pada aspek pembagaian secara geografis baik ciri, letak maupun posisi relatif wilayah terhadap wilayah lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tipologi wilayah tertinggal yaitu mengenai spesifik potensi dan permasalahan dalam perkembangan wilayah tertinggal terkhusus pada ciri geografis dan posisi relatif wilayah terhadap wilayah pusat pertumbuhan atau yang sering disebut dengan wilayah strategis (Muta'ali. 2014).

Pengelompokkan wilayah tertinggal dapat dibagi berdasarkan aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan dan kondisi geografisnya, dimana pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4. Pengelompokkan Wilayah Berdasarkan Tipologi

Bentuk Lingkungan Fisik	Letak Terhadap Kota/Pusat Pertumbuhan/Kawasan Strategis				
	Di dalam Kota	Di Pinggiran Kota	Di Koridor Transportasi Antar Kota	Jauh/Di Daerah Rural	Isolated
	Wilayah Maju			Wilayah Tertinggal	
Pulau	-	-	-	I	I
Pantai (Pesisir)	II	II	III	IV	IV
Dataran	V	VI	VII	VIII	IX
Sepanjang Sungai	X	X	X	XI	XI
Perbukitan	XII	XII	XII	XIII	XIII
Pegunungan	XIV	XIV	XIV	XV	XV

Pembagian tipologi desa berdasarkan aspek fisik menurut Muta'ali (2013)

diantaranya :

1. Tipologi desa pegunungan

Merupakan desa yang berada di wilayah dengan ketinggian > 500 meter dari permukaan laut, serta lereng > 40%. Desa dengan tipologi seperti ini biasanya memiliki sumberdaya air yang melimpah sebab didukung dengan curah hujan yang tinggi. Biasanya memiliki pola permukiman yang terpecah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.

2. Tipologi desa dan kelurahan perbukitan

Merupakan desa yang memiliki morfologi berbukit dan bergelombang dengan ketinggian 75-500 meter dan kemiringan 30-40%. Desa dengan tipologi perbukitan biasanya memiliki potensi kayu, tanaman tahunan, dan perkebunan.

3. Tipologi desa dan kelurahan pesisir/pantai

Desa dengan tipologi pesisir atau pantai merupakan kelompok desa yang berada dekat dengan dan berbatasan langsung dengan laut. Secara morfologi

memiliki kemiringan $< 5\%$, keberadaan yang dekat dengan laut memberikan potensi perikanan.

4. Tipologi desa pulau-pulau kecil

Secara umum desa yang berada di pulau-pulau kecil cenderung terpencil dan terpisah dari dataran luas. Sector yang paling berpotensi adalah perikanan, kelautan dan pariwisata.

Menurut Muta'ali (2013) tipologi desa berdasarkan aspek posisi geografis terhadap pusat pertumbuhan (kota) dibedakan menjadi :

1. Tipologi desa dan kelurahan di kota (urban)

Desa yang berada di wilayah kota biasanya memiliki jumlah penduduk yang tinggi, dengan mayoritas penduduk $>80\%$ bekerja di sector non pertanian, dan biasanya disebut dengan istilah kelurahan.

2. Tipologi desa dan kelurahan di pinggiran kota

Merupakan desa yang letaknya berada di pinggiran kota namun memiliki aksesibilitas yang baik terhadap kota. Desa yang berada pada jenis ini biasanya mengalami peningkatan jumlah penduduk diakibatkan dari dampak perluasan kota. Sehingga mengakibatkan lahan pertanian semakin berkurang akibat adanya konversi lahan ke kegiatan non pertanian.

3. Tipologi desa dan kelurahan di koridor antar kota

Merupakan desa yang letaknya di area sepanjang koridor jalur transportasi baik itu jalur darat antar kota, sehingga kegiatan masyarakat dipengaruhi oleh keberadaan jalur tersebut.

4. Tipologi desa dan kelurahan di perdesaan

Merupakan desa yang letaknya jauh dari kota, namun masih memiliki hubungan yang baik berupa aksesibilitas sehingga memungkinkan adanya hubungan desa-kota. Desa dengan tipologi seperti ini memiliki karakteristik jumlah penduduk yang rendah dan bekerja di sector pertanian selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang masih terbatas.

5. Tipologi desa dan ketutuhan terisolasi dari pusat perkembangan

Merupakan desa yang masih alami baik itu lingkungan alam, cara masyarakatnya dalam berkegiatan, adat istiadat yang masih dijunjung tinggi. Desa yang masuk ke dalam kategori ini biasanya merupakan desa yang memiliki jarak yang jauh dengan pusat perkembangan ataupun kota selain itu tidak didukung dengan sarana transportasi yang baik maka mengakibatkan ketertinggalan desa sebab tidak ada akses yang baik ke pusat, selain itu keberadaan fasilitas sarana prasarana yang minim memberi dampak pada rendahnya pengetahuan dan informasi terhadap dunia luar.

1.5.7. Karakteristik dan Permasalahan Wilayah Tertinggal

Menurut Muta'ali (2014) Karakteristik wilayah tertinggal berbeda dengan wilayah maju, yang membedakannya adalah dari segi permasalahan yang dihadapi dan jalan keluar dalam menangani permasalahan tersebut. Terdapat beberapa ciri umum atau karakteristik wilayah tertinggal diantaranya yaitu :

1. Kemiskinan

Kemiskinan secara material dapat berupa ketidak adanya hak milik atas asset ataupun tanah, sedangkan secara non material dapat berupa kemiskinan akan akses informasi, miskin ilmu pengetahuan. Kemiskinan biasanya sering

dikaitkan dengan rendahnya lapangan pekerjaan serta minimnya kompetensi dari sumberdaya masyarakat yang ada.

2. Kerentanan

Kerentanan wilayah biasanya sering dikaitkan dengan daya tahan wilayah yang rendah dalam menghadapi berbagai permasalahan atau ketidakmampuan dalam menangani permasalahan yang timbul baik itu permasalahan ekonomi, politik, sosial hingga fisik yang berkaitan dengan kebencanaan.

3. Kurangnya fasilitas

Rendahnya pembangunan berdampak pada rendahnya fasilitas yang ada sehingga dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya pun terbatas. Fasilitas yang biasanya kurang yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana peribadatan dan lain sebagainya. Fasilitas-fasilitas dasar yang sebenarnya sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan sehari – hari.

4. Terbatasnya sektor-sektor ekonomi produktif

Rendahnya pembangunan berdampak pada rendahnya investasi masuk ke dalam wilayah, wilayah yang terbatas dari segi fasilitas serta miskin sumberdaya akan sulit untuk dikembangkan sector-sektor produktif, sebab kebanyakan di wilayah-wilayah tertinggal pendapatan utama biasanya berasal dari hasil pemanfaatan sumberdaya alam.

5. Posisi geografis

Daerah tertinggal biasanya berada pada posisi geografis yang kurang menguntungkan, sebab kesulitan akses dan rendahnya sarana transportasi menjadikan posisi geografis sangat penting dalam kajian perkembangan

wilayah, contohnya yaitu daerah-daerah yang berada di pedalaman baik itu pulau-pulau kecil dan perbatasan. Posisi atau letak geografis berpengaruh terhadap proses perkembangan wilayah, sebab posisi geografis berkaitan dengan interaksi antar wilayah dan aksesibilitas, tingginya aksesibilitas dan hubungan antar wilayah di sekitar akan mempermudah dalam proses perkembangan dan mobilitas kebutuhan masyarakat.

6. Rendahnya Kualitas sumberdaya manusia

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat diakibatkan oleh kurangnya akses dan fasilitas pendidikan serta kurangnya informasi dengan dunia luar. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia akan berdampak pada angka pengangguran dan kesenjangan social.

7. Rendahnya partisipasi masyarakat

Masyarakat yang kurang informasi dan kebebasan dalam berpartisipasi berdampak pada pembangunan yang hanya dari sisi pemerintah tanpa campur tangan masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa timbul pembangunan yang tidak merata disertai dengan ketimpangan wilayah.

Menurut Bappenas (2016) Secara umum permasalahan dalam proses perencanaan dan koordinasi pembangunan Daerah Tertinggal berupa lemahnya koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Disamping itu, Daerah Tertinggal memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Sumberdaya manusia juga membutuhkan peningkatan dan pemberian konsentrasi yang lebih dikarenakan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan

masyarakat di Daerah Tertinggal. Sebagian besar kondisi wilayahnya juga sulit diakses dikarenakan aksesibilitas Daerah Tertinggal yang rendah terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Dan yang tidak kalah penting ialah terkait pengelolaan potensi sumber daya lokal yang belum optimal. Usaha percepatan pencapaian sasaran pokok pembangunan Daerah Tertinggal serta penyelesaian berbagai permasalahan di Daerah Tertinggal. Masalah yang diidentifikasi dalam impelentasi program/kegiatan di kawasan perbatasan ditemukan dari mulai segi perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan/pengelolaan, pengawasan, pemanfaatan, dan pelaporan.

Menurut Muta'ali (2014) berbagai permasalahan yang ada khususnya di wilayah tertingga diantaranya yaitu :

1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian yang belum optimal
2. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
3. Koordiansi yang lemah antara pelaku pembangunan di daerah tertinggal
4. Tindakan afirmasi terhadap daerah tertinggal belum optimal
5. Tendahnya tingkat aksesibiltas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan
6. Terbatasnya sarana prasaran pendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tertinggal

Setiap wilayah memiliki permasalahannya masing-masing, biasanya permasalahan dapat diidentifikasi melalui kondisi fisik/geografis dan administratif dari suatu wilayah, selain itu juga dapat dipengaruhi oleh factor perencanaan, kebijakan dan pengembangan wilayah yang berlaku. Berikut ini beberapa problematika yang ada di wilayah perdesaan

1. Rendahnya asset yang dikuasai oleh masyarakat perdesaan
2. Rendahnya kualitas Sumberdaya Manusia yang ditandai dengan rndahnya keterampilan.
3. Terbatasnya pengembangan alternatif lapangan pekerjaan lain selain yang bergerak di sector pertanian.
4. Rendahnya kelengkapan fasilitas dan tingkat pelayanan sarana perdesaan
5. Tingginya resiko kerentanan bagi para petani dan pelaku usaha pertanian
6. Lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi secara sektoral dan spasial
7. Meningkatnya perubahan penggunaan lahan pertanian subur dan irigasi untuk peruntukan lain
8. Rendahnya tingkat ketahanan pangan akibat dari rendahnya tingkat penguasaan lahan oleh masyarakat
9. Meningkatnya degradasi lingkungan dan sumberdaya alam
10. Belum ada tata ruang khusus bagi wilayah perdesaan
11. Pemahnya lembaga, organisasi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
12. Lemahnya kemandirian desa

Kebijakan pembangunan perdesaan

Pembangunan perdesaan merupakan suatu upaya dalam mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk dapat mencapai pertumbuhan desa secara merata, adil, mandiri dan berkelanjutan. Prinsip yang harus dipenuhi dalam pembangunan perdesaan diantaranya :

6. Pertumbuhan (growth)
7. Pemerataan (equity)
8. Kesejahteraan (welfare)
9. Kemandirian
10. Keberlanjutan (sustainability)
11. Partisipatif

1.5.8. Strategi dan Kebijakan

Menurut Suryono (2010) Kebijakan merupakan suatu hal (baik dalam bentuk aturan atau peringatan, baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengikat dan dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang dibidangnya, kebijakan dibentuk dan dibuat berdasarkan kondisi permasalahan yang sedang dihadapi, kebijakan hendaknya dipatuhi oleh seluruh komponen dan bagian di dalamnya, sebab kebijakan dibangun dengan tujuan untuk mengatur tatanan atau membawa suatu kondisi kearah yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan dalam mendukung perekonomian harus memuat strategi dasar dalam memecahkan permasalahan, pencapaian sasaran serta kebijakan yang mendukung

baik secara langsung maupun kebijakan yang berorientasi kepada program atau yang sering disebut sebagai kebijakan tidak langsung/turunan.

Menurut Nugroho (2004) Kebijakan pendukung merupakan kebijakan yang pengaruhnya secara tidak langsung terhadap iklim aktivitas perekonomian namun memiliki dampak yang dapat dirasakan, contoh dari kebijakan ini yaitu :

1. pembangunan infrastruktur
2. kebijakan ekonomi makro
3. kebijakan penataan ruang
4. pengembangan partisipasi masyarakat
5. pemerintahan
6. pembangunan kelembagaan

Menurut Haeruman (1997) dalam Nugroho (2004) kebijakan langsung merupakan kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian dan merupakan penyediaan kebutuhan pangan, papan, dan pakaian yang disertakan kenaikan produktivitas dan pendapatan. Upaya demikian harus mencakup langsung perbaikan akses terhadap sumber daya, akses terhadap pasar, teknologi, dan sumber-sumber pembiayaan. Contoh kebijakan langsung dalam peningkatan perekonomian daerah yaitu :

1. Pengembangan agribisnis dan peningkatan ketahanan pangan
2. Penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan daerah
4. Kebijakan bidang pertahanan

Menurut Bappenas (2014) Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Kebijakan tersebut diharapkan agar daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal
- b. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal
- c. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal
- d. Peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal
- e. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan.

Solusi atau terobosan menurut Bappenas (2016) dalam menyelesaikan permasalahan Daerah Tertinggal yaitu :

1. Mempercepat terbitnya Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2015-2019 yang berkualitas dan dapat dijadikan acuan bagi seluruh stakeholder dalam membangun daerah tertinggal

2. Merumuskan kebijakan dan skema pendanaan yang bersifat afirmatif dan asimetris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, antara lain melalui dana transfer daerah yang lebih memihak daerah tertinggal
3. Meningkatkan transfer *knowledge* dan difusi inovasi pembangunan di daerah tertinggal baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing
4. Menyediakan insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

Selain itu dalam upaya pengentasan Daerah Tertinggal maka diperlukan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal menurut Bappenas (2016) dapat difokuskan pada :

1. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan peluang investasi di Daerah Tertinggal
2. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar public
3. Pengembangan perekonomian masyarakat didukung oleh SDM yang berkualitas
4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan yang diarahkan pada pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) untuk investasi yang berdaya saing

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Daerah Tertinggal yang ada, maka implementasinya dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan perekonomian masyarakat

2. Peningkatan aksesibilitas penghubung ke pusat pertumbuhan
3. Peningkatan kualitas SDM dan Iptek
4. Pemenuhan SPM pelayanan dasar public
5. Pemberian tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian
6. Harmonisasi regulasi
7. Pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan
8. Pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi
9. Peningkatan konektivitas serta pengembangan ekonomi masyarakat berbasis komoditas lokal pada wilayah adat.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai Ketertinggalan Wilayah telah dilakukan di berbagai daerah, namun belum pernah dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya pada periode 12 tahun terakhir, selain itu penelitian ini menggunakan metode skoring untuk menentukan tingkat ketertinggalan. Pembagian tipologi berdasarkan aspek fisik dan posisi geografis terhadap pertumbuhan wilayah dilakukan guna mengetahui faktor penyebab ketertinggalan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara tinjauan langsung ke lapangan/observasi lapangan dan *indepth interview* untuk mengumpulkan data dan informasi guna penyusunan strategi. Penyusunan strategi pada penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT dimana mempertimbangkan dari hasil observasi dengan batasan indikator potensi desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007. Tabel keaslian penelitian dibawah ini menjelaskan penelitian-penelitian yang telah

dilakukan sebelumnya yang memiliki objek kajian mengenai ketertinggalan wilayah.

Tabel 1.5. Tabel Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Metode yang Digunakan	Hasil
1	Ibrahum 2006	Distribusi keruangan Desa-Desa Tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi karakteristik geografis desa desa tertinggal di Sumbawa Barat 2. Mempelajari distribusi keruangan desa-desa tertinggal di Sumbawa Barat 3. Menentukan faktor penentu dan besarnya faktor faktor tersebut berpengaruh terhadap predikat desadesa tertinggal Kabupaten Sumbawa Barat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menggunakan metode <i>survey</i>, analisis data sekunder ❖ tabulasi silang dan analisis statistik regresi berganda 	<ul style="list-style-type: none"> - Karakteristik geografis desa tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat - Distribusi desa tertinggal di Kabaupaten Sumbawa Barat - Faktor-faktor yang mempengaruhi predikat desa tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat
2	Riezky Ayudia Trinanda, dan Eko Budi Santoso 2013	Penentuan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertinggalan Kawasan Kabupaten Pamekasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab ketertinggalan kawasan di Kabupaten Pamekasan. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Mengidentifikasi faktor berdasarkan opini/pendapat para pakar/ stakeholders dengan menggunakan variabel yang diperoleh dari hasil tinjauan pustaka tinjauan teori. ❖ Penerapan teknik Delphi untuk identifikasi faktor yang mempengaruhi ketertinggalan 	Faktor-faktor yang berpengaruh dalam terbentuknya kawasan tertinggal Kabupaten Pamekasan yaitu; mata pencaharian, tingkat pendidikan, jumlah tenaga kerja, jumlah fasilitas kesehatan, jumlah fasilitas pendidikan, ketersediaan jalan aspal, ketersediaan sarana informasi, ketersediaan air bersih
3	Aini Fitri Maulidianti 2014	Evaluasi Ketertinggalan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan kondisi ketertinggalan di Kecamatan Batulanteh, Labangka, Lantung, dan Tarano. 2. Mendeskripsikan hasil komparasi kondisi ketertinggalan di Kecamatan Batulanteh, Labangka, Lantung, dan Tarano berdasarkan penentuan KPDT. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Metode evaluasi ❖ Evaluasi ketertinggalan di keempat kecamatan menggunakan teknik komparasi untuk mengetahui persamaan dan juga perbedaan kondisi ketertinggalan 	Berdasarkan hasil evaluasi, dari enam indikator yang digunakan oleh KPDT, keempat kecamatan ini dapat dikatakan cukup tertinggal dari aspek ekonomi, infrastruktur, dan juga aksesibilitas. Akan tetapi, dari dua jenis tipologi yang ditentukan, wilayah kecamatan yang berada pada daerah

		Batulanteh, Labangka, Lantung, dan Tarano)	3. Mengidentifikasi faktor – faktor lain di luar kriteria KPDT yang dapat diduga mempengaruhi perbedaan ketertinggalan di 4 kecamatan tersebut.		pegunungan lebih tertinggal di banding dengan daerah pantai
4	Saiful Zuhri 2014	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketertinggalan Wilayah di Pulau Lombok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertinggalan wilayah di Pulau Lombok ini 2. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat ketertinggalan wilayah di Pulau Lombok. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deduktif. ❖ Metode pengumpulan dan analisis data dilakukan melalui wawancara ❖ Uji silang (crosscheck) dengan data sekunder yang ada dan melakukan pengamatan atau observasi di lapangan 	Faktor-faktor yang mempengaruhi ketertinggalan wilayah di Pulau Lombok yaitu menyangkut masyarakat dan pemerintah daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut berupa tingkat perekonomian masyarakat yang masih miskin dan rendah daya belinya, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan infrastruktur yang belum optimal, dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
5	Happy Okysari 2015	Pengembangan Wilayah Tertinggal di Kabupaten Klaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi wilayah-wilayah tertinggal dan pola perkembangan wilayah di Kabupaten Klaten. 2. Menganalisis potensi dan permasalahan yang dimiliki wilayah tertinggal di Kabupaten Klaten. 3. Menyusun strategi kebijakan pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di Kabupaten Klaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Menggunakan sistem scoring berdasarkan indikator ketertinggalan wilayah. ❖ Metode RRA dan analisis observasi ❖ Menggunakan analisis SWOT dengan indepth Interview 	Persentase Desa Tertinggal di Kabupaten Klaten dengan menggunakan 4 indikator meliputi potensi desa, perumahan dan lingkungan, keadaan penduduk. Menghasilkan 158 desa tertinggal yang berada pada 24 kecamatan dari total 401 desa pada 26 kecamatan di Kabupaten Klaten
6	Nurdini Lestari 2016	Analisis Faktor-Faktor Penyebab Ketertinggalan Desa di Kabupaten Kuningan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis tingkat perkembangan wilayah desa-desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. 2. Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan desa-desa di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ metode survei dengan pendekatan kuantitatif dan deskripsi ❖ teknik sampel <i>purposive</i>. ❖ sampel responden dengan teknik sampel kuota 	Faktor-faktor penyebab ketertinggalan desa terdiri dari kondisi geografi (letak/jarak, aksesibilitas, dan bencana alam), kualitas sumberdaya manusia, dan kegiatan perekonomian.

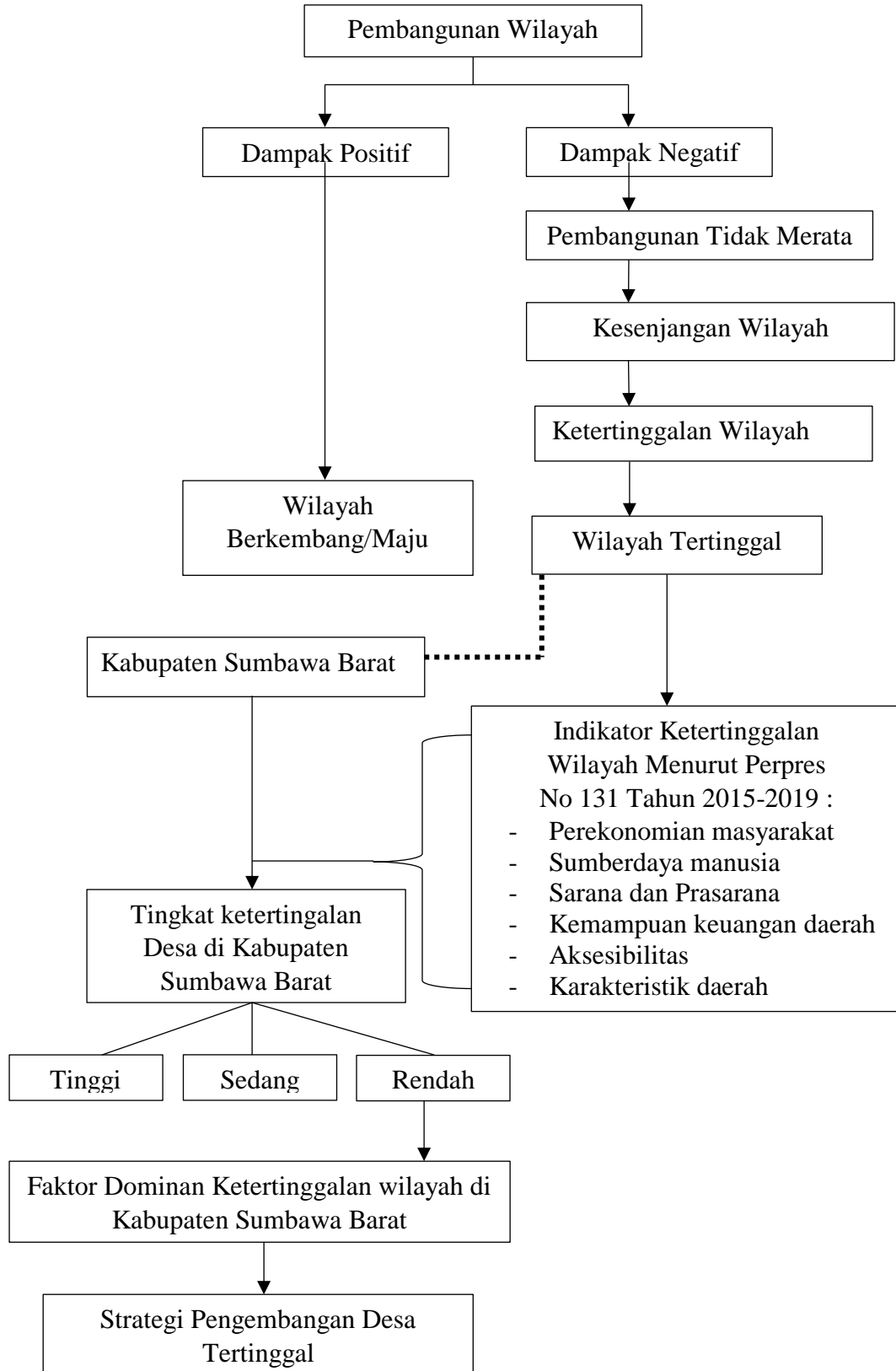
		Provinsi Jawa Barat	3. Menganalisis faktor-faktor penyebab desa tertinggal di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. 4. Memberikan arahan pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat.	❖ Tingkat perkembangan wilayah dianalisis menggunakan analisis faktor.	
7	Martina Ayu Sejati 2018	Analisis Faktor-Faktor Ketertinggalan Wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat	4. Menentukan tingkat ketertinggalan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat 5. Menganalisis faktor yang mengakibatkan ketertinggalan desa di Kabupaten Sumbawa Barat 6. Menentukan strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat.	❖ Analisis Faktor ❖ <i>Indepth Interview</i> dan Observasi Lapangan ❖ Analisis SWOT	

1.7. Kerangka Pemikiran

Pembangunan wilayah merupakan suatu proses yang dinamis dan multi dimensi sebab melibatkan berbagai aspek dan mengintegrasikannya dalam suatu wujud baik itu tindakan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan dan perubahan suatu wilayah kearah yang lebih baik. Dampak dari pembangunan dibedakan menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak negative dari pembangunan dapat berupa ketidakmerataan pembangunan. Ketidakmerataan pembangunan mengakibatkan kesenjangan antara wilayah. Kesenjangan wilayah mengakibatkan perbedaan tingkat perkembangan wilayah sehingga terdapat wilayah yang mengalami ketertinggal dan disebut dengan daerah tertinggal, sedangkan untuk wilayah yang mengalami perkembangan yang baik disebut dengan wilayah berkembang/maju.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk kedalam kategori Daerah Tertinggal menurut Perpres No. 131 Tahun 2015, untuk dapat mengetahui tingkat ketertinggalan wilayah (tinggi, sedang, rendah) yang ada maka digunakan acuan berupa indikator ketertinggalan wilayah menurut Perpres No 131 Tahun 2015-2019 berupa : Perekonomian masyarakat, Sumberdaya manusia, Sarana dan Prasarana, Kemampuan keuangan daerah, Aksesibilitas, dan Karakteristik daerah. Pada setiap indikator-indikator tersebut terdapat variabel didalamnya. Variabel-variabel tersebut digunakan untuk mengetahui faktor dominan yang mengakibatkan ketertinggalan desa,

setelah mengetahui faktor dominan tersebut maka disusun strategi guna pengembangan desa tertinggal.



BAB 2

METODE DAN TEKNIK ANALISIS

2.1. Pemilihan Lokasi Penelitian

Unit kajian wilayah tertinggal berbasis pada sistem administrasi khususnya Desa. Wilayah tertinggal pada tingkat kabupaten disebut sebagai daerah tertinggal yaitu kabupaten berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan sebagai daerah tertinggal, Lokasi penelitian berada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Tabel 2.1. Cakupan Wilayah Kajian

NO	CAKUPAN WILAYAH KAJIAN (PERSPEKTIF)	UNIT ANALISIS
1	Nasional	- Kabupaten - Desa
2	Provinsi	- Kabupaten - Kecamatan - Desa
3	Kabupaten	- Kecamatan - Desa

Menurut Muta'ali (2014) wilayah tertinggal pada tingkat desa disebut dengan desa tertinggal, dimana desa tertinggal memiliki karakteristik yaitu masyarakat dan wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan desa-desa lainnya dalam lingkup kabupaten yang sama. Desa menjadi unit terkecil dan strategis sebab dengan mengetahui sebaran desa tertinggal maka dapat diketahui dan mengukur tingkat ketertinggalan kabupaten/daerah. Semakin banyak desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal maka semakin besar peluang kabupaten tersebut masuk ke dalam daerah dengan kategori tertinggal.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk kedalam kategori Daerah Tertinggal menurut Perpres No. 131 Tahun 2015. Secara Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak di bagian barat pulau Sumbawa, tepatnya antara 08° 29' dan 9° 07' Lintang Selatan dan antara 116° 42' - 117° 05' Bujur Timur. Sumbawa Barat berbatasan langsung dengan Selat Alas di sebelah barat, Samudra Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Sumbawa di sebelah utara dan timur. Luas Kabupaten Sumbawa Barat sekitar 1.849,02 km², dengan ketinggian antara 0-1.730 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Sumbawa Barat merupakan daerah dengan topografi sangat curam atau memiliki kemiringan lahan diatas 40%. Rata-rata hari hujan di Kabupaten sumbawa barat Tahun 2016 berada pada rentang 6,6 sampai dengan 12,81 hari dengan curah hujan mencapai rata-rata 69,4 mm sampai dengan 145,72 mm setiap bulannya dimana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yang mencapai 380 mm. Rata-rata lama penyinaran matahari pada tahun 2016 mencapai 84,33 persen dengan kecepatan angin rata-rata 4,9 knots. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki 8 kecamatan diantaranya adalah Brang Ene, Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, Sekongkang, Seteluk, dan Taliwang. Pusat Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat berada di Kecamatan Taliwang. Dari delapan kecamatan tersebut terdapat total 66 desa (Kabupaten Sumbawa Barat dalam angka 2016).

Kecamatan Brang Ene merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki wilayah seluas 140,90 Km². Di sebelah utara

berbatasan dengan Kecamatan Brang Rea, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jereweh di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Taliwang, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jereweh (Kecamatan Brang Ene dalam Angka. 2017)

Kecamatan Brang Rea terletak di timur laut Sumbawa Barat, dengan luas hutan negara yang mencapai 69 persen dan topografi wilayah yang berbukit, kecamatan Brang Rea merupakan daerah resapan air yang ideal dan wilayah pertanian yang subur dengan ketersediaan air sepanjang tahun. Luas Kecamatan Brang Rea tahun 2016 tercatat 211,09 Km² yang terbagi menjadi 9 desa yaitu Sapugara Bree, Desa Beru, Tepas, Bangkat Monteh, Seminar Salit, Tepas Sepakat, Moteng, Lamuntet, dan Rarak Ronges. Dilihat dari jarak antara desa dengan ibukota kecamatan 8 desa yang ada di Kecamatan Brang Rea relatif dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, jarak tempuh berkisar antara 1 sampai 7 km. Berbeda halnya dengan desa rarak Ronges yang terletak di atas bukit dengan jarak tempuh mencapai 16 Km dari pusat kecamatan (Kecamatan Brang Rea dalam Angka 2017).

Kecamatan Jereweh merupakan satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Secara geografis Kecamatan Jereweh terletak di bagian selatan Kabupaten Sumbawa Barat dengan batas sebelah utara adalah Kecamatan Taliwang, sebelah selatan adalah Kecamatan Sekongkang dan Maluk, sebelah barat adalah selat alas dan kecamatan Brang Ene, serta Kabupaten Sumbawa di sebelah timur, dengan luas wilayah sebesar 260,581 Km², kecamatan ini terbagi menjadi empat desa yaitu Desa Belo, Desa Beru, Desa Goa dan Desa Dasan Anyar. Desa

terluas adalah Desa Beru dengan luas wilayah mencapai 122,43 Km² (Kecamatan Jereweh dalam Angka 2017)

Kecamatan Maluku merupakan kecamatan dengan luas terkecil di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2016 luas kecamatan Maluku tercatat 92,42 Km² atau sekitar 5 persen dari luas total Kabupaten Sumbawa Barat. Secara geografis Kecamatan Maluku terletak di bagian barat daya Sumbawa Barat dan berbatasan dengan Kecamatan Jereweh di sebelah utara dan timur, di sebelah Kecamatan Sekongkang di sebelah selatan Selat Alas di sebelah barat (kecamatan Maluku dalam Angka 2017).

Kecamatan Poto Tano merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang terletak paling utara dari Kabupaten Sumbawa Barat ini memiliki wilayah seluas 158.88 km² yang terbagi habis ke dalam 8 (delapan) desa, yaitu Desa Senayan, Mantar, Kiantar, Poto Tano, UPT Tambak Sari, Tuananga, Tebo dan Kokarlian. Jarak Kecamatan Poto Tano dari Ibukota Propinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) adalah kurang lebih 115 km, sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Taliwang kurang lebih 30 km. Sementara itu, jarak ibukota kecamatan ke masing-masing desa berkisar antara 2 km hingga 12 km. Adapun tinggi Kecamatan Poto Tano dari permukaan air laut berkisar antara 0 hingga 630 meter (Kecamatan Poto Tano dalam Angka 2017).

Kecamatan Sekongkang merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Wilayah Kecamatan Sekongkang terbagi menjadi tujuh desa definitif dan satu UPT yaitu Sekongkang Bawah, Sekongkang

Atas, Tongo, Ai Kangkung, Tatar, Talonang Baru, Kemuning dan UPT Tongo II SP 2. Kecamatan Sekongkang merupakan daerah tujuan transmigran. Desa Ai Kangkung, Desa Tatar dan Desa Talonang Baru terbentuk karena program transmigrasi. Sebelah utara Kecamatan Sekongkang berbatasan dengan Kecamatan Maluku, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Indonesia, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa (Kecamatan Sekongkang dalam Angka 2017).

Kecamatan Seteluk merupakan salah satu dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Wilayah Kecamatan Seteluk terbagi menjadi sepuluh desa yaitu Kelanir, Meraran, Air Suning, Rempe, Tapir, Seteluk Atas, Seteluk Tengah Lamusung, Desa Loka dan Seran. Dilihat dari letak geografisnya di bagian utara Kecamatan Seteluk berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taliwang di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Poto Tano dan berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa dan Kecamatan Taliwang di sebelah timur (Kecamatan Seteluk dalam Angka 2017).

Kecamatan Taliwang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki wilayah seluas 375.93 Km². Di bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Seteluk, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jereweh di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Seteluk dan Selat Alas dan berbatasan dengan Kecamatan Brang Ene di sebelah timur. Lebih jelas keberadaan dari Kecamatan Taliwang dapat diperhatikan pada Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Taliwang dan Peta wilayah administrasi Kabupaten

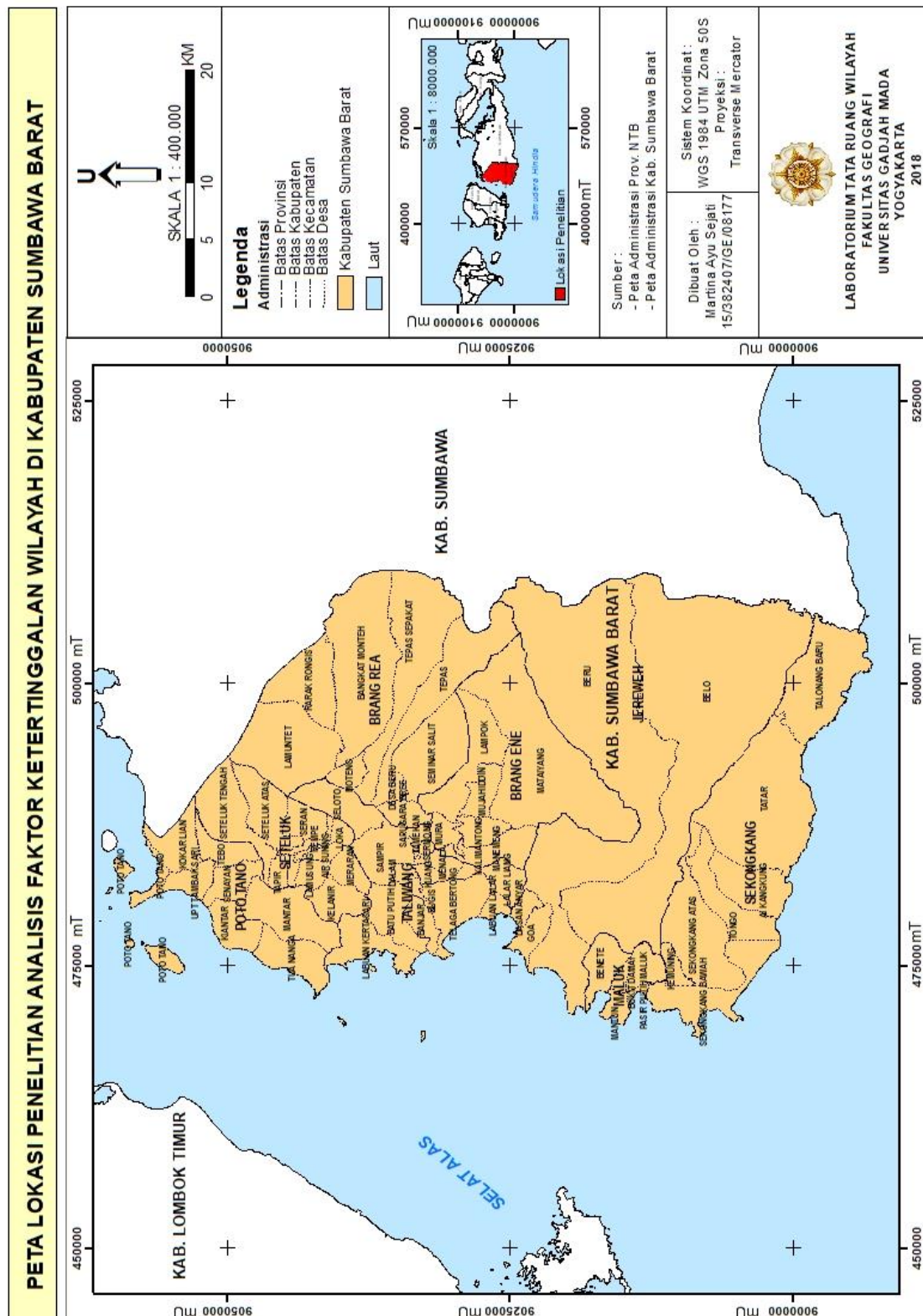
Sumbawa Barat. Kecamatan Taliwang terbagi menjadi 15 desa/kelurahan yang terdiri dari 7 Kelurahan dan 8 Desa (Kecamatan Taliwang dalam Angka 2017).

Adapun nama desa/kelurahan yang ada di setiap kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Daftar Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat

Kecamatan	Desa
Brang Ene	Mura
	Kalimantong
	Lampok
	Manemeng
	Mujahiddin
	Mataiyang
Brang Rea	Sapugara Bree
	Desa Beru
	Tepas
	Bangkat Monteh
	Seminar Salit
	Tepas Sepakat
	Moteng
	Lamuntet
	Rarak Ronges
Jereweh	Belo
	Beru
	Goa
	Dasan Anyar
Maluk	Maluk
	Benete
	Bukit Damai
	Mantun
	Pasir Putih
Poto Tano	Senayan
	Tebo
	Mantar
	Tuananga
	Kiantar
	Poto Tano
	Kokar Lian
	UPT Tambak Sari

Sekongkang	Sekongkang Bawah
	Sekongkang Atas
	Tongo
	Ai Kangkung
	Tatar
	Talonang Baru
	Kemuning
	UPT Tongo II SP 2
Seteluk	Kelanir
	Meraran
	Air Suning
	Rempe
	Tapir
	Seteluk Atas
	Seteluk Tengah
	Lamusung
	Desa Loka
	Seran
Taliwang	Batu Putih
	Banjar
	Lalar Liang
	Labuan Lalar
	Labuan Kertasari
	Telaga Bertong
	Kuang
	Bugis
	Dalam
	Menala
	Sampir
	Tamekan
	Seloto
	Sermong
	Arab Kenangan



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat.

2.2. Data dan Variabel Penelitian

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data sekunder yang didapatkan dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Instansi pemerintahan terkait, sedangkan data primer dapat berupa wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap *Key Person* dengan bantuan daftar pertanyaan untuk menambah informasi dan membantu dalam penyusunan strategi pengembangan desa tertinggal. Variabel-variabel yang digunakan merupakan hasil kombinasi antara BPS dan Kementerian KPDT. Variabel tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator-indikator menurut Perpres No 131 Tahun 2015-2019.

Tabel 2.3. Jenis dan Satuan Variabel Data

No	Data	Variabel	Jenis Data	
1.	Perekonomian Masyarakat	Jumlah Keluarga Miskin menurut Banyaknya Surat Miskin yang Dikeluarkan Oleh Desa	Data Sekunder	BPS
		Tingkat Pengangguran	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Keadaan Fisik Rumah yang Ditinggali	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Daerah Tempat Tinggal	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Bahan Bakar Utama Memasak	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Tempat Buang Air Besar	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Sumber Air Untuk Memasak	Data Sekunder	BPS
		Persentase Keluarga Menurut Sumber Penerangan Utama	Data Sekunder	BPS
		Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Petanian	Data Sekunder	BPS

No	Data	Variabel	Jenis Data	
		Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri	Data Sekunder	BPS
2.	Sumberdaya Manusia	Rata-rata Lama Sekolah	Data Sekunder	BPS
		Angka Melek Huruf	Data Sekunder	BPS
		Angka Kelahiran	Data Sekunder	BPS
		Angka Kematian	Data Sekunder	BPS
		Angka Harapan Hidup	Data Sekunder	BPS
		Migrasi Masuk	Data Sekunder	BPS
		Migrasi Keluar	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Penderita Gizi Buruk	Data Sekunder	BPS
		Banyaknya Penyandang Cacat	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Keluarga menurut Keikutsertaan dalam Program Pemerintah	Data Sekunder	BPS
3.	Sarana dan Prasarana	Jumlah Prasarana Kesehatan	Data Sekunder	BPS
				BPS
		Jumlah Tempat Ibadah	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Prasarana Pendidikan SD	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Prasarana Pendidikan SMP	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Prasarana Pendidikan SMA	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Prasarana Pendidikan PT	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Lembaga Pendidikan Keterampilan	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Lembaga Keuangan (koperasi, KUD, Pengadaian, Bank, lembaga kredit, lumbung desa, Asuransi)	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Sarana Perdagangan yang Ada (pertokoan, pasar, pasar hewan, mini market, kios, rumah makan, café, counter pulsa, Hotel)	Data Sekunder	BPS
		Banyaknya Fasilitas Olah Raga	Data Sekunder	BPS
		Banyaknya Sarana Angkutan Umum	Data Sekunder	BPS
		Sarana Hiburan dan Kebudayaan	Data Sekunder	BPS
4.		Luas/persentase sawah	Data Sekunder	BPS

No	Data	Variabel	Jenis Data	
	Kemampuan Keuangan Desa/Sumberdaya Ekonomi Desa	Jumlah ternak besar	Data Sekunder	BPS
		Jumlah ternak unggas	Data Sekunder	BPS
		Banyaknya Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Data Sekunder	BPS
		Jumlah unit usaha Produksi Penggalian	Data Sekunder	BPS
		Jumlah unit usaha Jasa	Data Sekunder	BPS
		Jumlah Unit usaha Jasa Persewaan Tanpa Operator	Data Sekunder	BPS
		Keberadaan tempat atau objek wisata	Data Sekunder	BPS
5.	Aksesibilitas	Panjang Jalan Menurut Jenis	Data Sekunder	BPS
		Jarak dari ibukota kecamatan	Data Sekunder	BPS
		Jarak dari ibukota kabupaten	Data Sekunder	BPS
		Jarak Terhadap fasilitas pendidikan terdekat	Data Sekunder	BPS
		Jarak Terhadap fasilitas Kesehatan terdekat	Data Sekunder	BPS
		Jarak Terhadap Pasar	Data Sekunder	BPS
6.	Karakteristik daerah	Kerawanan Gempa	Data Sekunder	BPB D
		Kerawanan Banjir	Data Sekunder	BPB D
		Kerawanan Longsor	Data Sekunder	BPB D
		Kawasan Lindung	Data Sekunder	BPB D
		Jumlah Kejahatan yang Terjadi	Data Sekunder	BPS

2.3. Keterkaitan Data dengan Populasi

Populasi adalah seluruh desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat meliputi desa-desa yang ada di Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, Jereweh, Maluk, Poto Tano, Sekongkang, Seteluk dan Taliwang (ibukota kabupaten), seluruh desa pada tiap kecamatan tersebut adalah populasi yang akan dihitung dengan cara skoring untuk mengetahui desa mana saja yang termasuk ke dalam kategori tertinggal. Identifikasi mengenai karakteristik setiap

desa dilakukan dengan mengamati seluruh anggota populasi melalui data sekunder (mempertimbangkan indikator dan variabel) sehingga hasil yang diperoleh adalah hasil skoring indikator-indikator ketertinggalan wilayah disetiap desa.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder didapatkan dari studi literatur sebelum dilakukan penelitian dan data dari lembaga penyedia data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa Barat, instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil menggunakan metode wawancara mendalam terhadap *Key Person* (pihak yang dianggap paling mengerti dan mengetahui kondisi permasalahan yang terjadi) dengan bantuan media berupa daftar pertanyaan dan observasi lapangan.

2.4.1. Kepustakaan

Menurut Fuad dan Kandung (2014) metode kepustakaan adalah merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau sumber informasi yang bersumber dari penelitian sebelumnya, literatur, buku, instansi pemerintahan, dokumen pemerintah serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dan mampu menambah informasi ataupun data yang diperlukan.

2.4.2. *Indepth Interview*

Wawancara menurut Mumtaz (2017) adalah proses mengumpulkan data atau informasi baik secara langsung (tatap muka) ataupun tidak langsung (melalui media perantara seperti telepon), terdapat berbagai macam jenis wawancara, diantaranya adalah wawancara dari segi strukturnya. Struktur wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur, semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Sedangkan *indepth interview* merupakan wawancara mendalam yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang mengetahui secara mendalam mengenai kondisi dan permasalahan yang terjadi seperti contoh pegawai pemerintahan ataupun kepala daerah/ pejabat daerah.

2.4.3. *Observasi Lapangan*

Menurut Fuad dan Kandung (2014) observasi lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data primer yang dilakukan dengan meninjau langsung kondisi dan keadaan yang ada sehingga bias didapatkan informasi atau data yang mendukung penelitian, dimana peneliti berperan sebagai *complete observer*, *complete participant*, *observer as participant* dan *participant as observer*.

Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pemenuhan tujuan dua penelitian yaitu menganalisis penyebab faktor yang paling dominan yang mengakibatkan ketertinggalan desa di Kabupaten Sumbawa Barat. Indikator potensi desa menjadi batasan dalam proses observasi lapangan, selain itu dengan melakukan observasi lapangan akan diketahui potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh desa yang masuk ke dalam kategori tertinggal di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan metode statistik yaitu dengan cara *multivariate analysis* dan dihitung dengan bantuan perangkat lunak komputer *Microsoft Excel* dan *SPSS*. Rekap data atau *input* dilakukan secara komputerisasi yaitu proses penginputan data dengan bantuan perangkat komputer untuk memudahkan dalam proses pengerjaannya.

2.5.1. Analisis Faktor

Menurut Muta'ali (2015) teknik analisis yang digunakan untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik dari beberapa indikator/ variabel dan mereduksi sejumlah data yang disederhanakan menjadi faktor-faktor utama. Analisis faktor didasarkan atas korelasi antara variabel yang ada. Jenis data yang digunakan yaitu interval atau rasio. Tujuan dari analisis faktor yaitu untuk mengurangi atau mereduksi jumlah indikator atau variabel menjadi lebih sederhana sehingga tidak ada pengulangan. Persyaratan dalam analisis faktor diantaranya yaitu data dari masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal (bukan sapaat mutlak) serta nilai KMO MSA $> 0,50$ dan nilai Bartlette Test of Sphericity (sig) $< 0,05$ dan Ada korelasi yang kuat antar variabel, ditandai dengan nilai Anti – Correlation antar variabel $> 0,50$. Hasil analisis faktor dapat digunakan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan perankingan. Pengolahan data menggunakan metode analisis faktor dapat dibantu menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian untuk mengetahui hasil akhir dari pengelompokan tingkat ketertinggalan desa menurut setiap indikator dilakukan dengan cara natural break pada software ArcGIS dan membagi ke dalam 3 kelas yaitu tinggi sedang dan rendah.

2.5.2. Tipologi Wilayah Tertinggal

Tipologi wilayah merupakan pembagaaian wilayah berdasarkan tipe-tipe dengan penciri yang sama namun ditekankan pada aspek pembagaian secara geografis baik ciri, letak maupun posisi relatif wilayah terhadap wilayah lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tipologi wilayah tertinggal yaitu mengenai spesifik potensi dan permasalahan dalam perkembangan wilayah tertinggal terkhusus pada ciri geografis dan posisi relatif wilayah terhadap wilayah pusat pertumbuhan atau yang sering disebut dengan wilayah strategis (Muta'ali. 2014).

Pengelompokkan wilayah tertinggal dapat dibagi berdasarkan aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan dan kondisi geografisnya, dimana pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6. Tipologi Wilayah Tertinggal Berdasarkan Aspek Fisik Dan Pertumbuhan

Bentuk Lingkungan Fisik	Letak Terhadap Kota/Pusat Pertumbuhan/Kawasan Strategis				
	Di dalam Kota	Di Pinggiran Kota	Di Koridor Transportasi Antar Kota	Jauh/Di Daerah Rural	Isolated
	Wilayah Maju			Wilayah Tertinggal	
Pulau	-	-	-	I	I
Pantai (Pesisir)	II	II	III	IV	IV
Dataran	V	VI	VII	VIII	IX
Sepanjang Sungai	X	X	X	XI	XI
Perbukitan	XII	XII	XII	XIII	XIII
Pegunungan	XIV	XIV	XIV	XV	XV

Pembagian tipologi wilayah akan membantu dalam mengetahui bagaimana distribusi dari desa yang mengalami ketertinggalan yang dilandasi oleh pencirian fisik. Distribusi desa tertinggal ini akan memudahkan dalam pemilihan sampel untuk dilakukan tinjauan lapangan dan proses *indepth interview*. Setiap variasi

bentuk lingkungan fisik akan diambil 1 sampel yang masuk ke dalam kategori paling tertinggal untuk dilakukan analisis lebih lanjut (*indepth interview*) serta dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat.

2.5.3. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

Menurut Mulyadi (2011) Penelitian dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan kejadian atau fakta/keadaan variabel dan keadaan yang terjadi secara nyata dengan menyajikan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menginterpretasi dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang ada, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan lain sebagainya. Hasil dari wawancara dengan *key person* kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

2.5.4. Analisis SWOT

Menurut Noor (2014) Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal maupun eksternal dari suatu masalah atau persoalan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan tantangan (Threath). Menurut Muta'ali (2003) Analisis SWOT apabila digunakan dengan benar maka dimungkinkan untuk dapat memberikan gambaran

menyeluruh mengenai situasi wilayah dalam hubungannya dengan rencana pengembangan.

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Peluang (O)	Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan	
Ancaman (T)		
	Mengerahkan kekuatan Kekuatan/Ancaman	Mengendalikan ancaman Kelemahan/Ancaman

Gambar 2.2. Elemen SWOT

Analisis SWOT digunakan untuk membantu dalam menyusun strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah. Telaah dokumen perencanaan, kebijakan dan wawancara key person menjadi sumber data utama dalam menyusun SWOT.

Secara keseluruhan metodologi penelitian ini dapat dirangkum menjadi satu kerangka metodologi yang ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7. Metodologi Penelitian

No	Tujuan Penelitian	Data		Metode Pengumpulan Data	Indikator	Teknik Pengolahan Data	Teknik Analisis	Unit
		Primer	Sekunder					
1	Menentukan tingkat ketertinggalan Desa di Kabupaten Sumbawa Barat		Data variabel penentu ketertinggalan wilayah	Data Sekunder dari BPS dan Instansi Terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian masyarakat • Sumberdaya manusia • Sarana dan Prasarana • Kemampuan keuangan daerah • Aksesibilitas • Karakteristik daerah 	<i>Analisis Faktor</i>	Deskriptif Kuantitatif	Desa
2	Menganalisis faktor yang mengakibatkan ketertinggalan di Kabupaten Sumbawa Barat		Data topografi Kabupaten Sumbawa Barat	• Data sekunder Instansi Terkait		• Penentuan tipologi Desa tertinggal (overlay antara peta topografi dengan hasil Rangking)	Deskriptif Kualitatif	Desa
		Data faktor yang mengakibatkan ketertinggalan		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Indepth interview</i> • Observasi Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian masyarakat • Sumberdaya manusia • Sarana dan Prasarana • Kemampuan keuangan daerah • Aksesibilitas • Karakteristik daerah 	• Transkrip hasil Wawancara	Deskriptif Kualitatif	Desa Tertinggal
3	Menentukan strategi dalam mengatasi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sumbawa Barat	Data potensi dan permasalahan desa tertinggal		• <i>Indepth Interview</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Perekonomian masyarakat • Sumberdaya manusia • Sarana dan Prasarana • Kemampuan keuangan daerah • Aksesibilitas • Karakteristik daerah 	Penyusunan SWOT guna penyusunan strategi	deskriptif kualitatif	Desa Tertinggal

2.6. Batasan Operasional

Karakteristik ketertinggalan wilayah di Indonesia diatur dalam peraturan presiden dengan menyebutkan beberapa indikator yang menjadi pertimbangan dan penentu tingkat ketertinggalan di suatu wilayah. Indikator Ketertinggalan Wilayah Menurut Perpres No 131 Tahun 2015-2019 :

- Perekonomian masyarakat
- Sumberdaya manusia
- Sarana dan Prasarana
- Kemampuan keuangan daerah
- Aksesibilitas
- Karakteristik daerah

Menurut Bappenas (2014) arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Kebijakan tersebut diharapkan agar daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengatasi ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang sudah relatif lebih maju.

Menurut Noor (2014) Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal maupun eksternal dari suatu masalah atau persoalan yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan

(*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threath*).

2.7. Jadwal Penelitian

keterangan	2018																2019																															
	Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Studi Pustaka																	KERJA PRAKTEK																															
Penulisan Proposal																																																
Seminar Usulan Penelitian																																																
Pengumpulan Data Sekunder																																																
Perumusan Instrumen																																																
Perijinan untuk Kegiatan Lapangan																																																
Kegiatan Lapangan																																																
Pengolahan Data																																																
Analisis Data																																																
Penyusunan Skripsi																																																
Ujian Skripsi																																																
Perbaikan Skripsi																																																

Daftar Pustaka

- BPS. 2016. *Kabupaten Sumbawa Barat dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Brang Ene dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Brang Rea dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Jereweh dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Maluk dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Poto Tano dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Sekongkang dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Seteluk dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- BPS. 2017. *Kecamatan Taliwang dalam Angka*. Sumbawa Barat : Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
- Bappenas. 2014. *Kajian Evaluasi RPJMN 2010-2014 Bidang Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.

- Bappenas. 2016. *Laporan Akhir Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan dalam Lingkup RPJMN 2015-2019*. Jakarta : Kementerian PPN/Bappenas.
- Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan. 2016. *Seminar Nasional : Pembangunan Jadesa (Jembatan Untuk Desa). Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal Serta Desa & Perdesaan* Rabu, 14 September 2016.
- Firdaus, Muhammad. Prof. Dr. SP., M.Si. 2013. *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen : Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta Dan Strategi Inisiatif*. Auditorium Rektorat Gedung Andi Hakim Nasoetion Institut Pertanian Bogor.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kementerian Desa. 2015. *Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019* disampaikan dalam Rakornas Kementerian Kominfo. Jakarta, 8 Juni 2015.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media : Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*. Vol. 15 No. 1 (Januari – Juni 2011).
- Mumtaz. 2017. *Kupas Tuntas Metode Penelitian*. Jakarta : Grasindo.
- Muta'ali, Lutfi. 2003. *Materi Ajar KKL Pembangunan Wilayah 2003*. Teknik Penyusunan Rencana Strategis dalam Pembangunan Wilayah (RRA,

Analisis Situasi, SWOT, RENSTRA). Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.

Muta'ali, Lutfi. 2013. *Pengembangan Wilayah Perdesaan (Perspektif Keruangan)*.

Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) UGM

Muta'ali, Lutfi. 2014. *Pengembangan Wilayah Tertinggal*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG).

Muta'ali, Lutfi. 2014. *Perencanaan Pengembangan Wilayah Berbasis Pengurangan Resiko Bencana*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG) Universitas Gadjah Mada

Muta'ali, Lutfi. 2015. *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang Dan Lingkungan*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Geografi.

Noor, Syamsudin. 2014. *Jurnal Intekna : Penerapan Analisis Swot dalam Menentukan Strategi Pemasaran Daihatsu Luxio Di Malang (Studi Kasus Pada Pt. Astra International Tbk. –Daihatsu Malang)*. Tahun XIV, No. 2, Nopember 2014 : 102 – 209.

Nugroho, Iwan. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES Indonesia.

Rustiadi, Ernan dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sumodiningrat, Gunawan. 2004. *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : Penerbit LP3ES.

Supriadi. 2013. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. *Focus group Discussion : Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan*

Tertinggal Dalam Mendukung Upaya Pemerataan Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Disampaikan pada Focus group Discussion Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Lombok, 26 Nopember 2013.

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Trinanda, Riezky dan Eko Budi. 2013. *Jurnal Teknik Pomits* : Penentuan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketertinggalan Kawasan Kabupaten Pamekasan. Vol. 2, No. 2, (2013) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print).

Peraturan Presiden No. 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015 – 2019.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun

Daftar Gambar

Gambar 1.2. *Sistematika Konsep-konsep Wilayah*. Dikutip dari buku : Rustiadi, Ernani dkk. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Gambar 2.1. *Peta Administrasi Kabupaten Sumbawa Barat*.

Gambar 2.2. *Elemen SWOT*. Diunduh dari : <https://oshigita.wordpress.com/tag/analisis-swot/>. Hari senin, 1 Oktober 2018, pukul 20.23 WIB oleh Martina Ayu Sejati.

